



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Selasa, 26 Agustus 2025



RINGKASAN BERITA HARI NI

Bunda PAUD Resmi Dikukuhkan, Bupati Subandi Tegaskan Komitmen Wujudkan PAUD Ramah Anak di Sidoarjo



Ingatkan Juru Masak Jaga Keamanan dan Kesehatan



PLT KEPALA Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Laksmi Herawati Yuwantina, minta supaya proses masak memasak yang ada di dapur Badan Gizi Nasional (BGN) yang Senin (25/8) kemarin, telah diresmikan di Kecamatan Sidoarjo, supaya memperhatikan aspek-aspek keamanan.

Selain itu, proses masak memasak yang dilakukan untuk melaksanakan program satuan pe-

Plt Kadinkes Sidoarjo, dr. Laksmi Herawati Yuwantina.

» ke halaman 11

Warung Remang-Remang dan Agen Miras Digerebek



Sediakan Pemandu Lagu, di Bringinbendo Taman

TAMAN-Satpol PP Kabupaten Sidoarjo bersama TNI dan Polri menggelar operasi gabungan penyalakan masyarakat (peka) di wilayah Kecamatan Taman. Hasilnya, petugas menemukan puluhan kardus berisi minuman keras (miras) oplosan serta pengamanan seorang pemandu lagu tanpa identitas.



DIGEREBEK: Satpol PP menemukan pemandu lagu dan miras di warung remang-remang kawasan Taman

warung remang-remang, petugas menemukan seorang pemandu lagu tanpa identitas kependudukan (KTP). Seluruh barang bukti beserta yang bersangkutan kemudian diamankan untuk pendataan dan pembinaan lebih lanjut.

Kepala Sekel Operasi dan Pengendalian (Kasi Ops) Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto Koesno, AP,

mengekalkan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman narkoba, minuman keras, dan perjudian. "Operasi ini adalah wujud nyata komitmen kita bersama dalam menciptakan ketertarikan umum dan ketertarikan masyarakat, khususnya menekan berbagai bentuk penyakit

» ke halaman 10

BERITA METRO
www.beritametro.co.id

SENIN, 25 AGUSTUS 2025

Pemprov Jatim Gelontor Bansos Rp 4,9 Miliar di Sidoarjo



SUDAH BEROPERASI Plt Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Lakhmie Herawati (dua dari kiri) saat mengecek makanan di dapur SPPG MBG Magersari.

Sukseskan Program MBG, Tambah Dapur SPPG di Magersari

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menambah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Magersari. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para pelajar.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, Lakhmie Herawati, mengatakan program MBG tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah pusat. Perlu adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat agar pelaksanaannya lebih maksimal.

» ke halaman 10

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp 4,9 miliar untuk warga Sidoarjo. Penyerahan dilakukan di Gedung Delta Widyad, akhir pekan lalu. Sidoarjo menjadi daerah ke-27 dari total 38 kabupaten/kota di Jatim yang menerima program tersebut.

Dari total Rp 4,9 miliar, sekitar Rp 3,96 miliar bersumber dari Dana Sosial Jatim. Dana itu digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, bantuan disabilitas, hingga dukungan bagi rumah sakit. Sidoarjo menerima Rp 290 juta, jelasnya Khofifah.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim menyerahkan Rp 320 juta melalui program BUMDes, Desa Berdaya, dan Jatim Puspita. "Program ini diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi desa sehingga desa mampu tumbuh mandiri," ujarnya.

Selain itu, bupati pabrik liris juga diarahkan pada pembangunan masyarakat. "Salah satunya melalui program Kewirausahaan Inkubasi Produktif (KIP) Jawa. Bantuan ini ditujukan bagi mereka yang kehilangan tulang punggung keluarga agar bisa tetap melanjutkan pendidikan," ujarnya.

Tak hanya itu, BUMD Jatim juga menyerahkan zakat produk sebesar Rp 500 ribu per orang untuk 50 pelaku usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima dan grosir. "Kita support agar mereka terhindar dari jeratan pinjol dan rentenir," pungkash Khofifah. (td)



Dipindai dengan CamScanner

Batik, Ikon Pemdes Kenongo Dalam Lomba Pawai Budaya Tulangan HUT RI Ke-80



Kegiatan Pawai Budaya Tulangan HUT RI Ke-80 Pemdes Kenongo

Sidoarjo, Pawai Kiri-Teranya malam tidak menyiratkan suasana perayaan HUT ke-80 Pemdes Kenongo. Kepala Desa Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Tirta Adi M. Pd, mewakili Bupati Sidoarjo, H. Subandi yang tidak bisa hadir di acara tersebut.

Hadir dalam acara Pawai Budaya Tulangan, Kepala Desa Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Tirta Adi M. Pd, mewakili Bupati Sidoarjo, H. Subandi yang tidak bisa hadir di acara tersebut.

menambah semangat nasionalisme. Kepala Desa Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Tirta Adi M. Pd, mewakili Bupati Sidoarjo, H. Subandi yang tidak bisa hadir di acara tersebut.

batik Kenongo yang sudah terkenal di kalangan Sidoarjo bahkan di seluruh Jawa Timur. Kepala Desa Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Tirta Adi M. Pd, mewakili Bupati Sidoarjo, H. Subandi yang tidak bisa hadir di acara tersebut.

Distribusi Beras SPPH Dipercepat

SIDOARJO - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPPH) dapat dipercepat dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya di wilayah setempat.

"Rata-rata kebutuhan beras medium di masyarakat lebih besar daripada beras premium. Diharapkan distribusi beras medium terutama milik Bulog yakni beras SPPH dapat segera terlaksana," kata Khofifah saat inspeksi ke lokasi keterlambatan stok beras SPPH di Pasar Larangan, Sidoarjo, Senin.

Saat melakukan inspeksi ke Pasar Larangan Sidoarjo tersebut, Gubernur Khofifah mendapatkan informasi dari pedagang pasar bahwa tidak ada perbedaan beras SPPH di pasar. Hal tersebut diketahui pedagang kepada Khofifah di hadapan awak media.

Khofifah menambahkan, para agen penjual beras SPPH yang sudah menyelesaikan persyaratan administrasi untuk menjadi penjual resmi, diharapkan bisa segera mendapatkan pasokan beras. Namun perlu penundaan pasokan, harus bisa diselesaikan dengan segera.

"Jika agen sudah menginput aplikasi, maka tentunya Poksi Bulog harus berkoordinasi terkait pasokan/pasokan," kata Khofifah saat inspeksi ke lokasi keterlambatan stok beras SPPH di Pasar Larangan, Sidoarjo, Senin.

Ditambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga telah melaksanakan koordinasi dengan Menteri Koordinator (Kemendagri) Bidang Pangan serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk merumuskan adanya regulasi mengenai distribusi beras SPPH tersebut.

"Harapan kami insentif vertikal baik Kemendagri, Bapanas, dan Bulog dapat segera membuat regulasi yang memudahkan distribusi beras SPPH agar masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga murah," kata Khofifah. » imm/loe

THE LOBSTER



PERSIAPAN: Pemain Deltras Sidoarjo saat menjalani latihan di Stadion Gelora Delta.

Uji Coba, PSMS Medan Tantang Deltras

DELTRAS Sidoarjo dijadwalkan menghadapi PSMS Medan dalam laga uji coba di Boyolali pekan depan. Pertandingan ini bakal menjadi tolak ukur kesiapan The Lobster sebelum kompetisi resmi bergulir.

Laga tersebut masuk dalam rangkaian pemusatan latihan PSMS Medan di Solo. Tim asal Sumatera Utara itu memang mencari lawan sepadan untuk mematangkan akudanya.

Pelatih PSMS Medan, Kas Hartadi, membenarkan agenda tersebut. "Kalau lawan Deltras FC rencananya di Boyolali," ujarnya.

Selain menantang Deltras, PSMS juga dijadwalkan melawan Kendal Tornado FC di Semarang. Bahkan, mereka masih menunggu keputusan uji coba kontra PSIS Semarang.

Bagi Deltras, duel ini menjadi kesempatan berharga untuk menambah jam terbang sekaligus menguji kekuatan lawan dari luar Jawa.

Pertemuan The Lobster kontra PSMS diprediksi berlangsung menarik. Dua tim legendaris dengan basis pendukung fanatik tersebut diyakini akan menyajikan laga sengit, meski hanya berstatus uji coba. (sai/vga)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undang
Sekretariat DPRD Sidoarjo

Bunda PAUD Resmi Dikukuhkan, Bupati Subandi Tegaskan Komitmen Wujudkan PAUD Ramah Anak di Sidoarjo



Bunda PAUD Resmi Dikukuhkan, Bupati Subandi Tegaskan Komitmen Wujudkan PAUD Ramah Anak di Sidoarjo

Siarpos.com, Sidoarjo – Mengacu pada Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan serta mengukuhkan Bunda PAUD Kabupaten, Pokja Bunda PAUD Kabupaten oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., M.Kn., serta pengukuhan Bunda PAUD se-Kecamatan Sidoarjo oleh Bunda PAUD Kabupaten Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Senin (25/08/2025).

Pada penetapan serta pengukuhan yang bertajuk “Bunda PAUD Gerakan Partisipasi Semesta Wujudkan PAUD Bermutu untuk Semua” ini, Bupati Subandi selain memberikan selamat juga menyampaikan pesan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki tujuan krusial, yaitu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik, mencakup aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan moral.

“Karena melalui PAUD berkualitas, anak-anak kita akan tumbuh secara optimal dan siap menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya.”

Oleh karena itu, peran Bunda PAUD sangatlah strategis. Bunda PAUD harus menjadi penggerak utama yang memberikan inspirasi, semangat, serta teladan bagi para pendidik dan orang tua. Diharapkan Bunda PAUD di semua tingkatan, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, mampu menghadirkan PAUD yang ramah anak, inklusif, dan menyenangkan.

"Untuk itu, mari kita jadikan momentum ini sebagai komitmen bersama. Kita siapkan anak-anak Sidoarjo menjadi generasi yang sehat, cerdas, berakarakter, dan berakhlak mulia. Karena dari merekalah masa depan Sidoarjo, Jawa Timur, dan Indonesia ditentukan," pintanya.

Ia pun menambahkan, dengan pelantikan ini diharapkan dapat menghantarkan anak didik di Kabupaten Sidoarjo, khususnya dari PAUD, menuju Indonesia Emas tahun 2045.

"Pemerintah juga akan terus mengawal perkembangan PAUD di Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan fasilitas yang memadai karena saya ingin anak didik mulai dari PAUD mempunyai kualitas SDM sehingga dari kecil akan tumbuh SDM yang luar biasa. Selain itu, bagi bunda-bunda PAUD pemerintah akan memfasilitasi agar Bunda PAUD dapat tercover dalam BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Tirta Adi, menuturkan bahwa penetapan dan pelantikan ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa Bunda PAUD adalah sosok penggerak utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini.

"Kehadiran Bunda PAUD di setiap tingkatan diharapkan dapat memberikan motivasi, inspirasi, beserta dukungan nyata bagi terciptanya pelayanan PAUD Holistik Integratif," katanya.

Penetapan dan pelantikan ini bertujuan untuk memberikan legalitas serta pengakuan resmi terhadap peran Bunda PAUD Kabupaten, Pokja Bunda PAUD, dan Bunda PAUD Kecamatan. Menkuatkan peran dan fungsi Bunda PAUD sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, serta menegaskan komitmen bersama Pemerintah Daerah sebagai mitra daerah, OPD terkait, Mitra PAUD dalam mendukung gerakan nasional PAUD Wajar 1 Tahun, PAUD Prasekolah, dan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.(Cak sokran).



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Apel Akbar, DPRD Sidoarjo Ingatkan 3.843 PPPK Paruh Waktu yang Diangkat Harus Disiplin dan Beretos Kerja Lebih Baik



Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo langsung menyampaikan warning (peringatan) bagi 3.843 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu saat Apel Akbar di Lapangan Parkir Timur GOR Delta, Sidoarjo, Jumat (22/08/2025). Ini menyusul, di sela-sela Apel Akbar yang juga diisi dengan kegiatan senam dan kerja bakti bersama - sama itu, terdapat sejumlah PPPK yang berkelompok (bergerombol) di pojok-pojokan dan sebagian juga bersantai-santai menikmati kopinya di sejumlah warung.

Padahal Bupati Sidoarjo, Subandi beserta jajarannya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga belum meninggalkan lokasi dan acara belum selesai secara keseluruhan.

Kondisi itu, mengisyaratkan itikad tidak baik dari para pegawai yang baru saja diangkat dan Surat Keputusan (SK)-nya masih dalam proses penerbitan itu. Apalagi, dalam Apel Akbar yang dipimpin Bupati Sidoarjo, Subandi itu juga dihadiri sejumlah anggota Forkopimda Sidoarjo diantaranya Dandim 0816 Sidoarjo.

Selain itu, acara juga dihadiri Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H Rizza Ali Faizin dan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, H Deny Hervanto. Bahkan acara juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 18 Camat. Termasuk juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Pemkab Sidoarjo, Budi Basuki.

"Peringatan itu langsung kami sampaikan karena saat Apel Akbar kemarin itu, ada sedikit kejadian yang mengecewakan. Acara belum selesai malah sebagian pegawai yang baru diangkat ini malah banyak yang mojik dan sebagian lagi cangkruk sambil menikmati kopinya. Sikap itu dinilai Bu Sekda Sidoarjo sebagai pegawai yang beler-beler dan mbalelo," ujar Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H Rizza Ali Faizin kepada republikjatim.com, Senin (25/08/2025).

Bagi politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sikap para pegawai yang dinilai beler itu sangat tidak menghargai perjuangan dari Pemkab dan DPRD Sidoarjo yang berupaya maksimal agar mereka tidak diberhentikan dari tugasnya atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Akan tetapi malah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

"Karena pada prinsipnya PPPK Paruh Waktu ini, sebenarnya tidak sama dengan PPPK Penuh. Karena PPPK Paruh Waktu dituntut untuk bekerja lebih ketat dengan mengutamakan disiplin dan etos kerja yang lebih tinggi. Karena itu, kami minta kedisiplinan dan etos kerjanya ditingkatkan saat Apel Akbar itu. Bahkan kami mengingatkan jangan sampai memberi contoh yang tidak baik bagi pegawai lainnya," pinta politisi muda PKB asal Dapil III Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon dan Kecamatan Krembung ini.

Politisi yang juga sempat sukses menjadi Ketua GP Ansor Kabupaten Sidoarjo ini, tidak menginginkan saat SK PPPK Paruh Waktu sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui BKD Pemkab Sidoarjo malah kinerjanya melemah dan tidak baik. Atau bahkan bekerja tanpa kedisiplinan dan tidak beretos kerja maksimal atau bekerja ala kadarnya atau sak karepe D dewe.

"Karena semua kinerja PPPK Paruh Waktu itu sebenarnya bakal dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan melalui assesment. Evaluasi dilakukan oleh setiap pimpinan OPD maupun para Camat di lokasi kerja masing-masing PPPK. Kalau kinerjanya baik maka hasilnya bagus dan kalau kurang baik maka dievaluasi dan kelulusannya ada di masing-masing Kepala OPD," tegas politisi muda asal Kecamatan Tulangan yang kini menjabat KASATKORWIL BANSER Jawa Timur ini.

Sedangkan ditanya soal penganggaran saat pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu itu, Ketua Komisi A yang juga sekaligus peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024 ini, tidak ada permasalahan krusial. Alasannya, semua sudah dikaji dan dikonsultasikan secara maksimal.

"Soal anggaran untuk belanja pegawai usai pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu ini tidak ada masalah dan sudah klir (clear). Karena prinsipnya penganggaran di pemerintahan itu, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen dari total seluruh anggaran yang ada. Artinya soal gaji dan penganggarnya sudah beres semua. Insyaallah soal anggarannya aman," urai Gus Reza sapaan akrab H Rizza Ali Faizin.

Janda Lansia 10 Tahun Tak Pernah Terima Bansos, Kades Tlasih, Sidoarjo Minta Data Diperbarui



KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Polemik data penerima bantuan sosial (bansos) kembali mencuat di Desa Tlasih, Kecamatan Tulangan. Dua janda lansia setempat, Roti'a (65) dan Juwaidah (75), mengaku sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah sekalipun menerima bantuan pangan maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT), meski hidup dalam keterbatasan.

"Kami tidak pernah dapat bantuan apa pun, baik beras maupun uang. Sudah lebih dari 10 tahun. Makan sehari-hari ikut anak saya, barusan saya beli beras sendiri," tutur Juwaidah saat ditemui bersama Kepala Desa Tlasih, Senin (25/8/2025).

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran adanya ketidakmerataan dalam penyaluran bansos. Sejumlah warga lain di Desa Tlasih yang dinilai layak pun disebut tidak pernah tersentuh bantuan.

Kepala Desa Tlasih, Irsyad, mengaku sering menerima keluhan serupa dari warganya. Ia meminta Dinas Sosial melakukan pembaruan data secara berkala agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. "Saya mohon ada sensus ulang, kalau bisa maksimal setiap enam bulan sekali. Banyak warga mengadu, dan ini

menjadi beban tersendiri bagi saya sebagai kepala desa karena dipilih masyarakat," ujarnya.

Irsyad juga menegaskan agar penerima yang dinilai sudah tidak layak segera dicoret. "Kalau ada warga yang tidak layak tetapi masih menerima bantuan, itu sebaiknya dihentikan. Apalagi itu terjadi sejak sebelum saya menjabat," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Drs. Ahmad Misbahul Munir, menjelaskan bahwa data penerima bantuan pangan berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog sebagai distributor. "Saya tidak tahu pasti sumber data yang digunakan pusat. Namun, lebih baik diusulkan melalui data kemiskinan. Program penanganan kemiskinan bisa diambil dari situ, dan pengusulan dapat dilakukan lewat operator desa masing-masing," jelasnya.

Kasus ini menyoroti persoalan klasik dalam penyaluran bansos: data penerima yang tidak mutakhir. Akibatnya, sebagian warga yang berhak justru terlewat, sementara mereka yang tidak lagi layak masih tercatat sebagai penerima. **(TAM)**

Gubernur Jatim Tinjau Distribusi Beras SPHP di Pasar Larangan Sidoarjo, Pastikan Ketersediaan untuk Masyarakat



Progres Jatim.com, Sidoarjo – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Bupati Sidoarjo, H. Subandi, meninjau langsung distribusi beras di Pasar Larangan, Sidoarjo, Senin (25/8/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna memastikan kelancaran penyaluran beras medium bersubsidi dari Perum Bulog kepada masyarakat.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan, khususnya beras, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menyambangi sejumlah toko pengecer yang ditunjuk sebagai mitra distribusi beras SPHP. Ia memeriksa ketersediaan stok, harga, serta memastikan para pedagang mampu mengakses aplikasi pendistribusian beras SPHP sesuai prosedur operasional.

"Dari toko beras yang kita kunjungi, sebagian sudah menggunakan aplikasi agar terhindar dari penyalahgunaan. Beras adalah komoditas pangan utama yang mayoritas dibutuhkan oleh setiap rumah tangga. Kita berharap Bulog bersama Badan Pangan Nasional dapat melakukan distribusi yang merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat," ujar Khofifah.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan pihaknya akan melakukan koordinasi intensif dengan Perum Bulog Cabang Sidoarjo untuk menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi.

"Permintaan beras medium di masyarakat Sidoarjo cukup tinggi. Kita akan segera berkoordinasi dengan Bulog Sidoarjo agar permintaan stok dapat tercukupi di tengah tingginya kebutuhan, serta distribusi berjalan lancar tanpa hambatan," tegas Subandi.

Selain berdialog dengan pedagang, Khofifah juga memantau kualitas beras yang tersedia di Pasar Larangan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam menjaga stabilitas harga serta menekan laju inflasi bahan pangan di Jawa Timur, khususnya Sidoarjo. (GUS)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua DPRD Sidoarjo Akan Panggil Klinik Siaga Medika Terkait Meninggalnya Balita Hanania Fatin



Kasus meninggalnya balita Hanania Fatin yang berusia 2 tahun 10 bulan warga Dusun Candi Pari, Kecamatan Porong Sidoarjo. Dugaan kematiannya adalah penundaan rujukan karena alasan biaya. Hal itulah yang mengundang Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih berkunjung ke rumah duka orang tua korban untuk menyikapi terkait kematiannya. Senin (25/8/2025).

Dalam kunjungan Ketua DPRD didampingi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Baznas Sidoarjo, serta Kepala Desa Candi Pari. Mereka mendengarkan langsung kronologi dari orang tua korban, Hasan Bisri dan Siti Nur Aini. Keluarga menceritakan kronologinya, bahwa selama lima hari dirawat di Klinik Siaga Medika, kondisi Hanania tidak membaik. Saat meminta rujukan ke RSUD, Sidoarjo, keluarga sempat diminta melunasi dahulu biaya sebesar Rp. 3 juta lebih. Baru setelah menjaminkan Kartu Keluarga asli, pasien dirujuk, namun kondisinya sudah kritis dan akhirnya meninggal dunia.



Mendapat cerita kronologis kejadian tersebut. Cak Nasih sapaan akrab, pastikan akan segera memanggil pihak Klinik Siaga Medika yang menangani korban untuk dimintai klarifikasi. Selain itu juga, mengapa pihak klinik menolak Kartu Indonesia Sehat (KIS) padahal masih aktif.

"Kami tidak ingin kasus ini dibiarkan begitu saja. Klinik harus memberikan penjelasan mengapa KIS pasien ditolak padahal faktanya masih aktif ketika dibawa ke RSUD. Kami juga akan mendalami dugaan penundaan rujukan karena

alasan biaya," tegas politikus PKB Di kesempatan itu. Baznas dan Dinsos turut memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian. Namun, menurut

Abdillah, langkah terpenting adalah memastikan keadilan dan perbaikan layanan kesehatan bagi masyarakat. "Setiap warga miskin memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Kami akan kawal kasus ini, dan DPRD akan memanggil pihak klinik secepatnya," tegasnya lagi.

Kasus ini terus menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), standar pelayanan klinik, serta dugaan adanya penagihan biaya meski pasien sudah meninggal dunia. (yun/znr).

Pemkab Sidoarjo Bedah Warung Rakyat di Desa Sarirogo



Republiknews.com, Sidoarjo – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, meninjau salah satu warung rakyat milik Bu Sumi di Desa Sarirogo, Senin (25/8). Warung ini merupakan salah satu dari tiga unit yang telah selesai direnovasi melalui program Bedah Warung Rakyat Pemkab Sidoarjo.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan realisasi program pemerintah daerah dalam mendukung pelaku usaha mikro berjalan dengan baik. Selain itu, Pemkab berharap peningkatan fasilitas dapat meningkatkan daya saing serta kesejahteraan pedagang kecil.

“Melalui program ini saya senang sekali karena ada warga Desa Sarirogo yang mendapat bantuan bedah warung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bu Sumi dan membuat beliau lebih bersemangat lagi berjualan,” ujar Mimik Idayana.

Mimik menegaskan, dukungan Pemkab Sidoarjo tidak berhenti pada renovasi fisik, tetapi juga mencakup akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda). Skema ini menawarkan bunga ringan 0,16% per bulan dengan plafon pinjaman hingga Rp50 juta. Fasilitas tersebut dapat diakses melalui BPR Delta Artha Sidoarjo dengan proses mudah, cicilan terjangkau, dan bunga yang sangat ringan.

“Kurda dirancang agar pelaku UMKM, seperti Bu Sumi, bisa memanfaatkannya untuk memperluas usaha tanpa terbebani bunga tinggi,” tambahnya.

Warung Bu Sumi (53) awalnya diusulkan melalui pemerintah desa setempat. Sebelum direnovasi, warung tersebut hanya beratapkan terpal. Kini tampil lebih layak, berlokasi strategis di dekat sawah dengan suasana sejuk yang kerap menjadi tempat tongkrongan warga sekitar.

(AHF/Kominfo Sidoarjo)

BERITA METRO
www.beritametro.co.id

✓ SENIN, 25 AGUSTUS 2025

Pemprov Jatim Gelontor Bansos Rp 4,9 Miliar di Sidoarjo

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp 4,9 miliar untuk warga Sidoarjo. Penyerahan dilakukan di Pendapa Delta Wibawa, akhir pekan lalu. Sidoarjo menjadi daerah ke-27 dari total 38 kabupaten/kota di Jatim yang menerima program tersebut.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bansos tidak hanya bersifat bantuan karitatif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. "Salah satunya melalui program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Jawa. Bantuan ini ditujukan bagi mereka yang kehilangan tulang punggung keluarga agar bisa tetap melanjutkan pendidikan," ujarnya.

Dari total Rp 4,9 miliar, sekitar Rp 3,96 miliar bersumber dari Dinas Sosial Jatim. Dana itu digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, bantuan disabilitas, hingga dukungan bagi buruh pabrik lintas wilayah. "PKH Plus diberikan kepada 608 keluarga dengan total Rp 1,2 miliar. Untuk penyandang disabilitas dialokasikan Rp 280 juta," jelas Khofifah.

Selain itu, buruh pabrik lintas wilayah menerima bantuan Rp 1,39 miliar untuk 1.057 penerima. Ada pula bantuan KIP Jawa bagi pelajar putri, penyandang disabilitas, dan pemuda mandiri.

Khofifah menambahkan, bansos juga menyasar kelompok rentan, termasuk lansia. "Kami ingin menjaga

ketahanan sosial dan memastikan kesejahteraan lansia serta penyandang disabilitas dengan memberikan alat bantu mobilitas," katanya.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim menyalurkan Rp 920 juta melalui program BUMDesa, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa. "Program ini diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi desa sehingga desa mampu tumbuh mandiri," ujarnya.

Tak hanya itu, BUMD Jatim juga menyalurkan zakat produktif sebesar Rp 500 ribu per orang untuk 50 pelaku usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima dan gerobakan. "Kita support agar mereka terhindar dari jeratan pinjol dan rentenir," pungkas Khofifah. (udi)



Dipindai dengan CamScanner



BM/ST

REVITALISASI ALUN-ALUN: Kondisi proyek revitalisasi alun-alun Sidoarjo.

Progres Revitalisasi Alun-alun 20 Persen, Target November Rampung

SIDOARJO (BM) - Revitalisasi Alun-alun Sidoarjo terus berjalan. Hingga saat ini progres pembangunan sudah mencapai 20 persen. Proyek yang dimulai sejak 1,5 bulan lalu itu ditargetkan tuntas pada Desember 2025.

Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (KRTH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Hery Santoso menyampaikan bahwa setiap perkembangan proyek tercatat lengkap melalui aplikasi e-kenda (elektronik kendali daerah). "Kalau di e-kenda progres Alun-alun sekitar 20 persen, kami targetkan setiap minggu ada peningkatan 4-5 persen," ujar Hery, Minggu (24/8).

Menurut Hery, pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi pengerjaan di lapangan. Nantinya, setelah rampung, Alun-alun Sidoarjo bakal menjadi ikon baru bagi Kota Delta.

Meski demikian, pengerjaan sempat terkendala persoalan teknis. Salah satunya terkait pemindahan kabel listrik yang melintas di area Alun-alun. Sebab, konsep pembangunan mengharuskan seluruh kabel dipindahkan ke bawah tanah.

"Yang lama memang dari PLN untuk memindahkan kabel-kabel, kontraktor sudah membayar, tapi belum dikerjakan, kemarin dari dinas sudah berkirim surat ke PLN," jelasnya.

Saat ini, pengerjaan masih

terfokus pada area dasar dan pembangunan wahana permainan anak. Beberapa bagian juga sudah dibongkar, termasuk Paseban Alun-alun.

Revitalisasi Alun-alun Sidoarjo dikerjakan oleh PT Samudra Anugrah Indah Permai dengan nilai kontrak sebesar Rp 24,6 miliar. DLHK menargetkan proyek ini bisa selesai pada November 2025.

"Harapannya ketika November selesai, kekurangan kecil bisa langsung diperbaiki. Dengan begitu, Alun-alun bisa segera dinikmati masyarakat Sidoarjo. Kami targetkan bulan November rampung, sehingga kalau ada bagian kecil yang kurang sempurna bisa langsung diperbaiki," pungkasnya. (udi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PERTANIAN

Penyerapan Pupuk Subsidi Terkendala KTP Petani Rusak dan Sawah Banjir

SIDOARJO - Serapan pupuk subsidi di Kabupaten Sidoarjo tahun ini terkendala beberapa hal, mulai dari persoalan KTP petani yang rusak hingga banjir yang melanda lahan pertanian di wilayah timur Sidoarjo.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo Eni Rustianingsih mengungkapkan, banyak petani yang masih menggunakan KTP rusak atau buram. Kondisi itu membuat data sulit terbaca oleh sistem aplikasi, sehingga proses penebusan pupuk subsidi tertunda. "Padahal petani ini sangat membutuhkan pupuk. Karena masalah administrasi, distribusinya jadi terhambat," katanya kemarin (25/8).

Menurutnya bencana banjir juga mempengaruhi tingkat serapan pupuk. Meski demikian, serapan hingga Juli tetap menunjukkan progres positif. Pupuk urea terserap 51,5 persen, NPK 64,9 persen, dan pupuk organik 5,1 persen. (eza/uzi)

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

DIRESMIKAN: Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo Lakhsmie Herawati (kiri) didampingi Ketua Yayasan Perempuan Semangat Garuda Rahmawati (dua dari kanan) mengecek makanan menu MBG di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Magersari kemarin (25/8).

Dapur SPPG Magersari Layani Enam Sekolah

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Magersari kemarin (25/8). Dapur SPPG tersebut rencananya akan melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di enam sekolah area Kelurahan Magersari.

"Kami layani di SMPN 1 Sidoarjo, SMPN 2 Sidoarjo, SDN Magersari, TK Magersari dan lainnya sekitar Ma-

gersari," ujar Ketua Yayasan Perempuan Semangat Garuda Rahmawati. Wanita yang juga kepala pengurus dapur SPPG Magersari itu mengatakan, akan membagikan 4.000 paket makanan ke sekolah-sekolah tersebut.

Sejumlah referensi menu juga ditampilkan saat peresmian. Mulai dari menu spageti dengan bola-bola daging, hingga menu tradisional seperti nasi kuning. "Setiap hari kami

sajikan menu variatif, tapi tetap sesuai standar gizi bagi anak-anak," katanya.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo Lakhsmie Herawati mengatakan, program MBG perlu kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan yayasan. "Dari kerjasama ini, lahirlah dapur SPPG Magersari yang dipersiapkan dengan ketentuan ketat," katanya. (eza/uzi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kami juga akan meminta jaminan untuk dicantumkan dalam surat kesepakatan pengembalian antara penjual dan pembeli.”

TJETJEP MUHAMMAD YASIN
Perwakilan pembeli tanah kavling

Urutan Pengembalian Uang Pembeli Tanah Kavling Ditentukan lewat Undian

SIDOARJO - Bos PT Makmur Tentram Berprestasi (MTB) Kurniawan Yuda Soesanto baru akan mengembalikan uang pembeli tanah kavling mulai bulan depan. Namun, teknis pengembalian sudah dirancang. Urutannya ditentukan melalui undian.

Tjetjep Muhammad Yasin, pencahara Agus Santoso, pem-

beli yang juga pengadu perkara itu ke polisi, menjelaskan, penentuan dengan sistem itu yang paling memungkinkan dilakukan. Sebab, prosesnya dapat berjalan tanpa tendensi. “Kemungkinan yang paling fair dengan sistem kocokan,” katanya kemarin (25/8).

Tjetjep mengungkapkan, pembeli yang jumlahnya

ratusan akan dikumpulkan. Nama masing-masing dimasukkan ke dalam kotak. Urutan pengembalian ditentukan urutan nama yang keluar.

Tjetjep mengungkapkan, diperlukan jaminan untuk mencegah kemungkinan gagal bayar. “Kami juga akan meminta jaminan untuk dicantumkan dalam surat kesepakatan

pengembalian antara penjual dan pembeli,” paparnya.

Tjetjep menambahkan, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan penyidik terkait pengembalian itu. Dia ingin tanda tangan dilakukan di depan polisi. “Agar ada tanggung jawab lebih kalau memang berkomitmen mengembalikan,” katanya. **(edi/uzi)**

Jawa Pos

Sidoarjo

Jawa Pos METROPOLIS • SELASA 26 AGUSTUS TAHUN 2025 | HALAMAN 18

Pasokan Beras SPHP
Pasar Larangan Tersendat

Tunggu Verifikasi
Online dari Bulog

SIDOARJO - Sejumlah pedagang di Pasar Larangan mengeluhkan belum adanya suplai beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog. Menanggapi keluhan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung mengecek kondisi di Pasar Larangan kemarin (25/8). Sejumlah pedagang mengaku belum bisa menjual beras SPHP lantaran pendaftaran di aplikasi Bulog belum diverifikasi. "Stok SPHP di kios kami belum ada karena verifikasi belum keluar dari Bulog. Padahal sudah cukup kami aplikasi online. Pedagang lain juga sama, belum bisa nyetok," ujarnya.

DISTRIBUSI BERAS SPHP MINIM

Proses distribusi harus berdasarkan aplikasi untuk memudahkan pendataan dan pemantauan.

Permintaan masyarakat terhadap beras SPHP cukup tinggi karena kualitasnya bagus dan harganya lebih terjangkau dibanding beras medium biasa.

Gubernur Jatim Khofifah memastikan distribusi SPHP akan dimaksimalkan pada akhir Agustus.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber



Mayoritas Masih Menunggu

Menurutnya, hanya segelintir pedagang yang sudah menerima beras SPHP. "Di dalam pasar mungkin ada tiga pedagang yang sudah. Tapi mayoritas masih menunggu," imbuhnya.

Padahal, beras itu banyak diminati. Sebab, harga beras SPHP dipatok Rp 12.500 per kilogram. Angka itu lebih rendah dibanding beras medium biasa yang kini dijual sekitar Rp 13.500 ribu per kilogram. "Kalau kualitas SPHP bagus, pasti cepat habis. Peminatnya banyak karena

harganya lebih terjangkau," kata pria 43 tahun itu.

Distribusi Harus Lewat Aplikasi

Gubernur Jatim Khofifah menjelaskan bahwa distribusi SPHP memang harus melalui aplikasi agar terhindar dari penyalahgunaan. "Dua penjual yang kami kunjungi sudah mendaftar, tinggal menunggu proses berikutnya. Karena kebutuhan beras medium tinggi, maka harus terus dimonitor apa kendalanya dan apa solusinya," katanya. Khofifah mengungkapkan, pertemuan dengan Menko Pangan dan Bananas sudah dilakukan tiga kali. Dalam pertemuan itu, Dirut Bulog diminta segera memaksimalkan penyaluran



TANGGAPI KELUHAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) mengecek beras di Pasar Larangan kemarin (25/8). Pemprov Jatim mengupayakan distribusi optimal di akhir Agustus.

SPHP. "Kami upayakan mudah-mudahan akhir Agustus ini distribusi bisa berjalan optimal, sesuai regulasi yang berlaku," jelasnya.

Undang Bulog

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo

Subandi menegaskan pihaknya segera mengundang Bulog untuk mempercepat realisasi. "Kami akan koordinasikan dengan Bulog agar segera menjalankan apa yang diperintahkan Presiden Prabowo, terutama soal pemenuhan pangan,"

ujarnya. Subandi juga memastikan akan turun mengecek langsung ketersediaan SPHP di tiap pasar. "Kami akan pantau terus, supaya SPHP benar-benar ada dan bisa dibeli warga dengan harga terjangkau," ujarnya. (eza/uzi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

538 Instansi Usulkan Formasi PPPK Paruh Waktu

Total 1.068.495 Pegawai
atau 78 Persen
dari Yang Diajukan

JAKARTA - Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN)
Zudan Arif Fakrulloh menga-

takan, per 22 Agustus 2025,
ada sekitar 1.370.523 orang
yang berpotensi masuk usulan
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh
Waktu. Dari jumlah tersebut,
sudah 1.068.495 pegawai atau

sekitar 78 persen, yang di-
usulkan oleh 538 instansi.

Menurut Arif, instansi yang
mengusulkan itu terdiri dari
49 instansi pusat dan 489
instansi daerah ■

Baca 538 Instansi... Hal 2



Ini menggembirakan
karena progresnya sudah
sangat bagus. Sudah 1,068 juta
atau 78 persen."

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Kepala BKN

Berita-berita lain bisa di JAWAPOS.CO.ID dan [JAWAPOS TV](http://JAWAPOS.TV) / e-mail redaksi EDITOR@JAWAPOS.CO.ID

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

538 Instansi Usulkan Formasi PPPK Paruh Waktu

Sambungan dari.hal 1

"Ini menggembirakan, karena progresnya sudah sangat bagus. Sudah 1,068 juta atau 78 persen," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, kemarin (25/8).

Namun, masih ada 62 instansi yang belum mengusulkan kebutuhan PPPK Paruh Waktu. Sebab, kata Arif, dari instansi tersebut, ada potensi sekitar 235.533 pegawai atau 17,2 persen honorer yang sejatinya bisa menjadi PPPK Paruh Waktu.

Termasuk, adanya potensi 66.495 orang atau 4,9 persen yang tidak diusulkan oleh instansi. Adapun instansi-instansi tersebut meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, hingga Kota Malang.

Arif mengungkapkan, ada berbagai alasan instansi di daerah belum mengusulkan PPPK Paruh Waktu. Salah satunya, soal ketersediaan anggaran. "Nah yang tidak diusulkan ini teridentifikasi dengan berbagai alasan, antara lain meninggal, kemudian sudah tidak aktif bekerja, instansi menilai tidak ada kebutuhan di

organisasinya, dan keempat tidak tersedia anggaran," terangnya.

Bedasarkan data BKN, ada 27.644 orang atau 41,6 persen dari honorer yang tidak diangkat beralasan tidak aktif bekerja. Kemudian, 26.395 atau 39,7 persen lainnya yang berpotensi tidak diangkat karena ketidaktersediaan anggaran. Sementara, 11.404 atau 17,2 persen tidak diangkat karena tidak ada kebutuhan di instansi, dan 1.052 atau 1,6 persen lainnya karena meninggal.

Masa Transisi

Deputi Bidang SDM Apa-

ratur Kemen PANRB Aba Subagja mengimbau agar honorer yang masuk dalam PPPK Paruh Waktu tidak perlu khawatir tidak diangkat menjadi PPPK. Sebab, PPPK Paruh Waktu menjadi jembatan dalam masa transisi sebelum mereka diangkat secara resmi menjadi PPPK. Nantinya, pegawai tersebut diberikan NIPPPK.

"PPPK Paruh Waktu itu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN). Justru itu masa transisi ketika dari aspek keuangan belum terpenuhi, jadi status hukum dinaikkan," tegasnya. (mia/aph)

Jawa Pos

Ingatkan Juru Masak Jaga Keamanan dan Kesehatan



PLT KEPALA Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr Laksmi Herawati Yuwantina, minta supaya proses masak memasak yang ada di dapur Badan Gizi Nasional (BGN) yang Senin (25/8) kemarin, telah diresmikan di Kecamatan Sidoarjo, supaya memperhatikan aspek-aspek keamanan.

Selain itu, proses masak memasak yang dilakukan untuk melaksanakan program satuan pe-

Plt Kadinkes Sidoarjo,
dr Laksmi Herawati Yuwantina.

►► ke
halaman 11



Ingatkan Juru Masak Jaga Keamanan dan Kesehatan

● Sambungan hal 1

layanan pemenuhan gizi (SPPG) itu, juga diminta supaya bisa memberikan menu makanan yang seimbang dan sehat. Yakni, Ada unsur protein, karbohidrat, sayuran dan buah.

“Ini penting, dan harus terus dilakukan, prinsipnya harus ada gizi yang berimbang,” komentar dr Laksmi, disela-sela kegiatan peresmian dapur SPPG yang berada di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo itu.

Sejumlah undangan hadir dalam kegiatan itu, ada dari anggota Forkopimka kecamatan, jajaran kelurahan Magersari dan undangan terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Yayasan Perempuan Semangat Garuda, Rahmawati, menuturkan dalam kegiatan SPPG yang melayani wilayah Kecamatan Sidoarjo itu, akan dikerahkan sebanyak 20 juru masak. Selama Seminggu, mereka akan memasak selama 5 hari.

Dalam sehari program SPPG di kecamatan Sidoarjo ini, akan memproduksi menu makan antara 3 ribu porsi hingga 4 ribu porsi. Ribuan porsi itu akan diperuntukkan pada siswa sekolah di 6 titik lokasi yang berada di wilayah Kecamatan Sidoarjo.

“Kami akan usahakan supaya bahan pangan yang dipakai adalah pasokan masyarakat Sidoarjo. Sehingga akan tumbuh penguatan ekonomi lokal,” komentarnya. [kus.gat]

CS Dipindai dengan CamScanner



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



NAIK KELAS: Perumahan CitraGarden Sidoarjo dengan view danau banyak diminati konsumen yang mementingkan kualitas lingkungan dan gaya hidup.

Konsumen Lirik Hunian Mewah di Kawasan Kota Sidoarjo

Incar Fasilitas Penunjang Gaya Hidup

SIDOARJO - Kawasan Kota Sidoarjo dilirik pengembang sebagai kawasan hunian potensial untuk segmen atas. Selain harga lahan yang hampir menyamai hunian

ibu kota. Fasilitas pendukung setara rumah mewah mampu menyedot konsumen.

Direktur Ciputra Group Agung Krisprimandoyo mengatakan, kinerja penjualan properti di beberapa proyek masih mencatatkan pertumbuhan. Namun, sebagian lagi terlihat stagnan bahkan menurun. "Komposisinya

seimbang. Sepertiga tumbuh, sepertiga *so-so*, sepertiga menurun," jelasnya saat menunjukkan rumah contoh terbaru di CitraGarden Sidoarjo kemarin (25/8).

Namun, hal itu tidak membuat pengembang mengerem kinerjanya. Mereka yakin dengan karakteristik setiap proyek yang berbeda tetap

membuka peluang konsumen untuk beli. Misalnya, proyek Sidoarjo kota yang saat ini segmennya makin tinggi. Terakhir, rumah yang diluncurkan berada di kisaran Rp 4,5 miliar. "Wajar jika akhirnya kami mengincar kelas yang lebih tinggi. Karena lahan yang makin terbatas," jelasnya.

General Manager CitraGar-

den Kevyn Hadiano menjelaskan bahwa kemungkinan kelas kawasan bisa saja kembali ditingkatkan. "Tentu saja, harga yang naik harus disertai dengan benefit bagi konsumen. Pemandangan danau menjadi salah satu prestise bagi konsumen yang ingin meningkatkan gaya hidup mereka," katanya. (bil/gal)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SELASA 26 AGUSTUS 2025



Pencurian motor di Mojokerto .

5 Maling Motor dan Penadah 6 TKP di Mojokerto Diringkus

Mojokerto – HARIAN BANGSA

Satreskrim Polres Mojokerto meringkus 5 maling sepeda motor sekaligus penadahnya yang beraksi di 6 TKP. Salah satu pelaku bahkan sempat berkelahi dengan korban.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauzy Pratama menjelaskan, 2 maling sepeda motor ditangkap Tim Jatanras dan Polsek Pungging yang dipimpin Ipda Edy Santoso pada Minggu (10/8). Tersangka MM (21), warga Dusun Prodo, Desa Sapulante, Pasrepan, Pasuruan ditangkap sekitar pukul 03.20 WIB.

Saat ditangkap, MM dan RH (31) akan membobol rumah kos di Dusun Polaman, Desa Purwojati, Ngoro, Mojokerto. Namun, RH berhasil kabur sambil mengancam polisi dengan pedang. Maling asal Kauman, Desa/Kecamatan Pasrepan ini akhirnya diringkus sekitar pukul 05.40 WIB.

"Kedua pelaku mengaku mencuri motor di 4 TKP, yaitu di Perumahan Pondok Indah, Dusun Ketok, Desa Tunggalpager, Pungging, Mojokerto. Sedangkan 3 TKP di Kecamatan Ngoro, Mojokerto," jelasnya kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

Fauzy menuturkan, MM dan RH mengasak 2 sepeda motor sekaligus dari teras rumah Ahmad Rifqy Sa'dulloh (27), warga Perumahan Pondok Indah 1 Blok G Nomor 3 pada Sabtu (2/8). Yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam merah nopol W 8766 BR dan Honda Scoopy warna coklat hitam nopol L 6881 MN. "Korban baru tahu saat akan berangkat kerja sekitar pukul 04.30 WIB, dua motornya sudah hilang," terangnya.

Dari penangkapan MM dan RH, polisi menyita barang bukti 1 sepeda motor Honda Vario warna merah, 1 pedang, 1 helm, 1 kunci T, 5 anak kunci T, serta 2 ponsel. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP.

Tim Jatanras Unit Tipidum Satreskrim Polres Mojokerto bersama Unit Reskrim Polsek Dlanggu juga meringkus BAW (26), warga Dusun Paris, Desa Seduri, Mojosari, Mojokerto. BAW ditangkap di Jalan Pemuda, Mojosari pada Sabtu (9/8) sekitar pukul 17.30 WIB.

Menurut Fauzy, BAW dibekuk karena mencuri sepeda motor milik Akhmad Fauzi (49), warga Dusun Lengkong, Desa Kedunglengkong, Dlanggu, Mojokerto pada Sabtu (9/8) sekitar pukul 01.30 WIB. Saat itu, tersangka sempat berkelahi dengan korban.

Sebab ketika mencuri sepeda motor Honda PCX warna merah nopol S 2305 NBS, BAW kepegok istri korban. Mendengar keributan tersebut, warga sekitar berdatangan membantu korban. Pelaku pun menodongkan senjata tajam, lalu kabur membawa sepeda motor korban. (md/rus)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN **mandiri**
Berdasarkan Pasal 8 (3) UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penitipia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran pembeli lelang dengan jenis pemenuhan lelang secara tertulis (sistem bidding) yang dapat dilihat di Website LUKN. **SELANGKAPANG** atau barang jaminan (dalam lelang) yaitu: Gedung
atau nama:
Erik Salsaria, kempis
Gedung tanah bertingkat bangunan dua lantai sesuai SHM No. 285 an. Erik Salsaria
Perumahan: Bumi Pajene Selaras Blok C6 No. 09, Desa Tanculan, Kecamatan Tanculan, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Mencari pembeli

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim

Janda Lansia Warga Desa Tlasih Belum Terima Bantuan

SIDOARJO - Sejumlah warga Desa Tlasih, Kecamatan Tulangan, mengaku tidak pernah tersentuh bantuan sosial pemerintah, baik berupa bantuan pangan (beras) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT). Fakta ini terungkap dari keluhan warga yang disampaikan kepada wartawan saat ditemui di rumahnya Senin (25/8/25).

Dua janda lansia, Ibu Roti'a (65) dan Ibu Juwaidah (75) warga RT 4 RW 1 tersebut menuturkan, selama lebih dari 10 tahun saya tidak pernah sekali pun mendapatkan bantuan. Padahal, menurut pengakuan mereka, kondisi ekonomi seperti ini.

"Makan tiap hari ikut anak saya yang masih bujang. Ini barusan saya nempur (beli beras)," ungkap Ibu Juwaidah.

"Kami tidak pernah dapat bantuan apa pun, baik beras maupun uang. Sudah 10 tahun lebih, dan sudah saya sampai ke Pak Lurah niki," ungkap kedua janda tersebut Senin (25/8/25).

Warga berharap pemerintah desa maupun instansi terkait bisa lebih jeli dalam melakukan pendataan penerima bantuan. Mereka khawatir adanya ketidakmerataan dalam penyaluran bansos yang membuat sebagian warga merasa terabaikan.

Pantauan duta dilapangan, diketahui masih ada beberapa warga Desa Tlasih yang lain, yang belum atau tidak mendapatkan bantuan, yang memang layak untuk mendapatkannya.

Sementara Kepala Desa Tlasih M. Al Irsyad, Kades Irsyad biasa

sebagai implemenasi dari Perda Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPRD). • Pili

disapa mengatakan, kerap warga yang tidak dapat mengadu kepada saya.

"Saya mohon agar dilakukan sensus ulang oleh Dinas Sosial, kalau bisa maksimal setiap enam bulan sekali, jangan terlalu cepat-cepat. Ini menjadi keluhan banyak masyarakat kepada saya. Bahkan menjadi beban tersendiri bagi saya sebagai Kepala Desa, karena saya dipilih oleh masyarakat," ujar Kades Irsyad.

Lalu, kepada siapa lagi masyarakat harus mengadu jika bukan ke Kepala Desa? Katanya database sudah ada di Dinas Sosial. Maka saya minta dilakukan sensus ulang, dan saya juga sudah mengajukan permintaan tersebut kepada Dinas Sosial.

"Bilamana ada warga yang tidak layak tetapi masih mendapatkan bantuan, itu sudah terjadi sejak sebelum saya menjabat sebagai Kepala Desa Tlasih ya mohon dicoret," pungkas Irsyad.

Terpisah Drs. Ahmad Mishbahul Munir, M.Si, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dikonfirmasi mengatakan, untuk bantuan pangan (beras) data dikirimkan oleh Pusat (Badan Pangan), Bulog yang ditunjuk untuk mendistribusikan.

"Saya tidak tahu data yang digunakan oleh pusat bersumber dari data mana. Menurut saya lebih baik diusulkan di data kemiskinan. Karena bisa jadi program penanganan kemiskinan dalam bentuk apapun bisa diambil dari data kemiskinan, dapat diusulkan melalui operator desa masing-masing," terang Mishbah. • Loe



Dua janda lansia saat didampingi Kepala Desa Tlasih menyampaikan keluhan mereka saat ditemui di rumah mereka, Senin (25/8/25).

ah Pesisir

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat inspeksi ke Pasar Larangan Sidoarjo, Senin (25/8/2025).
keterangan terkait kelangkaan beras SPHP di berbagai daerah, di
Pasar Larangan Sidoarjo, Senin (25/8/2025).

Distribusi Beras SPHP Dipercepat

SIDOARJO - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dapat dipercepat dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya di wilayah setempat.

"Rata-rata kebutuhan beras medium di masyarakat lebih besar daripada beras premium. Diharapkan distribusi beras medium terutama milik Bulog yakni beras SPHP dapat segera terlaksana," kata Khofifah saat inspeksi terkait ketersediaan stok beras SPHP di Pasar Larangan, Sidoarjo, Senin.

Saat melakukan inspeksi ke Pasar Larangan Sidoarjo tersebut, Gubernur Khofifah mendapatkan informasi dari pedagang pasar bahwa tidak ada peredaran beras SPHP di pasar. Hal tersebut dikeluhkan pedagang kepada Khofifah di hadapan awak media.

Khofifah menambahkan, para agen penyalur beras SPHP yang sudah menyelesaikan persyaratan administrasi untuk menjadi penyalur resmi, diharapkan bisa segera mendapatkan pasokan beras. Adanya persoalan penundaan pasokan, harus bisa diselesaikan dengan segera.

"Jika agen sudah mengisi aplikasi, maka tentunya Pak Bupati harus berkoordinasi (terkait suplai/pasokan). Ini harus kita monitor, kendalanya apa, kemudian solusinya bagaimana," ujarnya.

Ditambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga telah melaksanakan koordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan pekan lalu untuk membahas solusi dari permasalahan tersebut.

Dari koordinasi tersebut Khofifah menyatakan beras SPHP milik Bulog diharapkan dapat segera terdistribusi merata mulai akhir Agustus 2025.

Di lain sisi, Khofifah turut mendorong Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk merumuskan adanya regulasi mengenai distribusi beras SPHP tersebut.

"Harapan kami instansi vertikal baik Kemenko Pangan, Bapanas, dan Bulog dapat segera membuat regulasi yang memudahkan distribusi beras SPHP agar masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga murah," kata Khofifah. • imm/loe

Jawa Pos

Warung Remang-Remang dan Agen Miras Digerebek



Sediakan Pemandu Lagu, di Bringinbendo Taman

TAMAN-Satpol PP Kabupaten Sidoarjo bersama TNI dan Polri menggelar operasi gabungan penyakit masyarakat (pekat) di wilayah Kecamatan Taman. Hasilnya, petugas menemukan puluhan kardus berisi minuman keras (miras) oplosan serta mengamankan seorang pemandu lagu tanpa identitas.

Sasaran pertama penyisiran berada di sebuah toko di Dusun Bringin Kulon, Desa Bringinbendo. Di lokasi tersebut, petugas mendapati 21 kardus berisi arak oplosan milik Muhammad Jamil.

Tidak berhenti di sana, tim gabungan melanjutkan operasi ke bawah Flyover Trosobo. Di salah satu



DIGEREBEK: Satpol PP menemukan pemandu lagu dan miras di warung remang-remang kawasan Taman.

warung remang-remang, petugas menemukan seorang pemandu lagu tanpa identitas kependudukan (KTP). Seluruh barang bukti beserta yang bersangkutan kemudian diamankan untuk pendataan dan pembinaan lebih lanjut.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (Kasi Ops) Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto Koesno, AP,

menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menekan pelanggaran perda sekaligus menjaga ketertiban umum.

"Operasi ini adalah wujud nyata komitmen kita bersama dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, khususnya menekan berbagai bentuk penyakit

masyarakat," ungkap Novianto, Senin (25/8).

Ia menambahkan, Satpol PP Sidoarjo berupaya menegakkan aturan dengan tetap menjunjung tinggi sikap humanis, profesional, serta bersinergi bersama TNI dan Polri.

"Kami mengapresiasi dukungan penuh dari jajaran TNI dan Polri.

● Ke Halaman 10



 **RADAR**
SIDOARJO.ID

Tinjau Pasar Larangan,...

"Kami akan koordinasikan dengan Bulog agar segera menjalankan perintah Presiden Prabowo, terutama soal pangan," katanya.

Subandi menyebut akan turun langsung mengecek ketersediaan beras di pasar. "Beras medium ini banyak dibutuhkan masyarakat Sidoarjo. Insyaallah kami pantau terus agar benar-benar tersedia," tandasnya.

Di sisi lain, sejumlah pedagang mengaku masih terkendala karena pendaftaran melalui aplikasi Bulog

belum diverifikasi. Salah satunya, Eko, pedagang di Pasar Larangan.

"Saya sudah daftar sejak dua pekan lalu, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Banyak pedagang lain juga sama, belum bisa nyetok SPHP," keluhnya.

Saat ini, harga beras SPHP dipatok Rp 12.500 per kilogram, lebih murah dibandingkan beras medium biasa yang dijual Rp 11 ribu hingga Rp 13 ribu per kilogram.

"Kalau kualitas SPHP bagus, pasti cepat habis. Peminatnya banyak karena harganya lebih terjangkau," pungkas Eko. (sai/vga)

 **RADAR**
SIDOARJO.ID



M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

SUDAH BEROPERASI: Plt Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Lakhmie Herawati (dua dari kiri) saat mengecek makanan di dapur SPPG MBG Magersari.

Sukseskan Program MBG, Tambah Dapur SPPG di Magersari

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menambah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Magersari. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para pelajar.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, Lakhmie Herawati, mengatakan program MBG tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah pusat. Perlu adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun lembaga

ga masyarakat agar pelaksanaannya lebih maksimal.

Salah satunya diwujudkan melalui kerja sama dengan Yayasan Perempuan Semangat Garuda. "Dari kerja sama ini lahirlah dapur SPPG Magersari yang dipersiapkan dengan ketentuan ketat," ujarnya, Senin (25/8).

Menurut Lakhmie, dapur MBG harus memenuhi standar sarana, prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan tata kelola. Hal itu penting agar makanan yang didistribusikan

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sukseskan Program...

kepada siswa benar-benar aman dan bergizi. "Kami meminta seluruh pengelola dapur memperhatikan aturan

Warung Remang-Remang...

Sinergitas dan soliditas antarinstansi menjadi kunci keberhasilan menjaga

yang berlaku. Perlengkapan dan alur kerja wajib dipatuhi agar tujuan memberikan gizi terbaik bagi anak-anak bisa tercapai," tegasnya.

Ia menambahkan, dapur MBG merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Indonesia. Karena itu, aspek kecil seperti kualitas sarana dan kompetensi SDM harus diperhatikan.

"Penjamah makanan juga diharapkan mengikuti pelatihan khusus untuk memastikan keamanan pangan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Perempuan Semangat Garuda, Rahmawati, menyoroti masih adanya peningkatan kasus stunting di Sidoarjo. Menurutnya, pemenuhan gizi anak sekolah melalui MBG sangat penting untuk menekan angka tersebut.

"Banyak anak berangkat sekolah tanpa sarapan. Melalui MBG, mereka mendapat asupan bergizi langsung dari sekolah," ungkapnya.

Rahmawati menyebut, dapur MBG Magersari ditargetkan mampu menyiapkan sekitar 4.000 paket makanan

setiap hari. Paket itu akan disalurkan ke enam sekolah di wilayah Sidoarjo Kota, antara lain SMPN 1 Sidoarjo, SMPN 2 Sidoarjo, SDN Magersari, TK Magersari, dan sekolah lainnya di sekitar Magersari.

"Kami berharap program MBG ini bisa benar-benar menjaga kesehatan serta mendukung tumbuh kembang anak-anak Sidoarjo," pungkasnya.



M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

SIDAK: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Sidoarjo Subandi saat meninjau beras SPHP di Pasar Larangan.

Tinjau Pasar Larangan, Gubernur Khofifah Dorong Distribusi Beras SPHP lewat Aplikasi

KOTA-Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Larangan, Sidoarjo, Senin (25/8). Dalam kunjungan tersebut, Khofifah menekankan pentingnya penggunaan aplikasi dalam penyaluran beras SPHP agar lebih transparan dan terhindar dari penyalahgunaan.

"Dua penjual yang kami kunjungi sudah mendaftar, tinggal menunggu proses berikutnya. Karena kebutuhan beras medium tinggi, maka harus terus dimonitor apa kendalanya dan apa solusinya," ujar Khofifah.

Ia juga menyampaikan bahwa beberapa hari sebelum-

nya telah bertemu Menko Pangan dan Kepala Bapanas. Dalam pertemuan itu, Dirut Bulog diminta segera memaksimalkan penyaluran beras SPHP.

Khofifah berharap distribusi SPHP bisa segera berjalan lancar. "Mudah-mudahan akhir Agustus ini distribusi bisa berjalan optimal sesuai regulasi yang berlaku. Ketersediaan beras murah harus benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan pihaknya siap mengawal penuh distribusi beras SPHP di wilayahnya. Ia juga memastikan akan segera berkoordinasi dengan Bulog.

● Ke Halaman 10



 RADAR
SIDOARJO.ID

Tinjau Pasar Larangan,...

"Kami akan koordinasikan dengan Bulog agar segera menjalankan perintah Presiden Prabowo, terutama soal pangan," katanya.

Subandi menyebut akan turun langsung mengecek ketersediaan beras di pasar. "Beras medium ini banyak dibutuhkan masyarakat Sidoarjo. Insyaallah kami pantau terus agar benar-benar tersedia," tandasnya.

Di sisi lain, sejumlah pedagang mengaku masih terkendala karena pendaftaran melalui aplikasi Bulog

belum diverifikasi. Salah satunya, Eko, pedagang di Pasar Larangan.

"Saya sudah daftar sejak dua pekan lalu, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Banyak pedagang lain juga sama, belum bisa nyetok SPHP," keluhnya.

Saat ini, harga beras SPHP dipatok Rp 12.500 per kilogram, lebih murah dibandingkan beras medium biasa yang dijual Rp 11 ribu hingga Rp 13 ribu per kilogram.

"Kalau kualitas SPHP bagus, pasti cepat habis. Peminatnya banyak karena harganya lebih terjangkau," pungkas Eko. (sai/vga)

 RADAR
SIDOARJO.ID

THE LOBSTER



PERSIAPAN: Pemain Deltras Sidoarjo saat menjalani latihan di Stadion Gelora Delta.

Uji Coba, PSMS Medan Tantang Deltras

DELTRAS Sidoarjo dijadwalkan menghadapi PSMS Medan dalam laga uji coba di Boyolali pekan depan. Pertandingan ini bakal menjadi tolok ukur kesiapan The Lobster sebelum kompetisi resmi bergulir.

Laga tersebut masuk dalam rangkaian pemusatan latihan PSMS Medan di Solo. Tim asal Sumatera Utara itu memang mencari lawan sepadan untuk mematangkan skuadnya.

Pelatih PSMS Medan, Kas Hartadi, membenarkan agenda tersebut. "Kalau lawan Deltras FC rencananya di Boyolali," ujarnya.

Selain menantang Deltras, PSMS juga dijadwalkan melawan Kendal Tornado FC di Semarang. Bahkan, mereka masih menunggu kepastian uji coba kontra PSIS Semarang.

Bagi Deltras, duel ini menjadi kesempatan berharga untuk menambah jam terbang sekaligus menguji kekuatan lawan dari luar Jawa. Pertandingan juga diyakini bakal memberi atmosfer berbeda bagi anak asuh Widodo Cahyono Putro.

Pertemuan The Lobster kontra PSMS diprediksi berlangsung menarik. Dua tim legendaris dengan basis pendukung fanatik tersebut diyakini akan menyajikan laga sengit, meski hanya berstatus uji coba. (sai/vga)

Batik, Ikon Pemdes Kenongo Dalam Lomba Pawai Budaya Tulangan HUT RI Ke-80

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Teriknya matahari tidak menyurutkan antusias puluhan ribu penonton masyarakat Kecamatan Tulangan dan khususnya Desa Kenongo dalam memeriahkan Pawai Budaya memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80, yang digelar oleh Forkopimka Tulangan, Minggu (24/08/2025) Pagi sampai selesai.

Kegiatan Pawai budaya itu dilepas langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo, Dr. Tirto Adi. M. Pd. mewakili Bupati Sidoarjo, H.Subandi yang tidak bisa hadir di acara tersebut.

Hadir dalam acara Pelepasan Wayang Pawai Budaya Tulangan, Kadispendik Kab. Sidoarjo, Zamroni Kudhori (Fraksi PKB) Rizza (Fraksi PKB) Yarno (Fraksi PDIP) dan Asmara Hadi (Camat Tulangan) Tu-



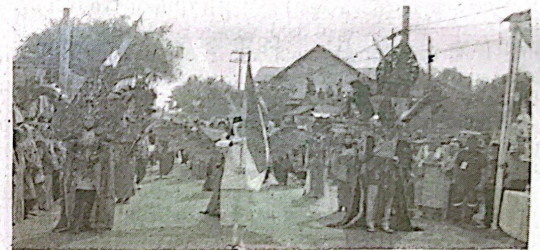
Kegiatan Pawai Budaya Tulangan HUT RI 80 Pemdes Kenongo.

langan .Kegiatan Wayangan Pawai Budaya Tulangan diikuti oleh seluruh Pemdes Se Kecamatan Tulangan dan Instansi dengan mengambil rute Start jalan raya Pangkemi dan Finish di depan Kecamatan Tulangan.

Sepanjang rute Wayang pawai budaya Tulangan antusias masyarakat memadati sisi jalan untuk menyaksikan penampilan para peserta. Sorak-sorai dan tepuk tangan mengiringi setiap rombongan yang melintas,

menambah semarak suasana perayaan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo,Dr.Tirto Adi.M.Pd saat melepas peserta pawai menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan masyarakat Kecamatan Tulangan yang hadir menyaksikan kegiatan Wayangan Pawai Budaya Tulangan. Karena hal ini merupakan aktualisasi melestarikan kearifan Budaya lokal yang ada di Wilayah Tulangan.



ungkapnya.

Kepala Desa Kenongo ,H.M.Husen ,saat ditemui awak media Pojokkiri menyampaikan bahwa Pawai Budaya Tulangan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga aktualisasi budaya kearifan budaya lokal warga Tulangan.

Kenapa di Pawai budaya Tulangan,Desa Kenongo mengambil Tema “ Batik Identitas Bangsa “ ,karena di desa Kenongo sendiri sudah punya ikon dengan

batik Kenongo yang sudah terkenal di kalangan Sidoarjo bahkan di seluruh Jawa Timur.

Lanjut M.Husen, batik memiliki makna yang mendalam sebagai perekat bangsa Indonesia sekaligus menjadi simbol persatuan.batik merupakan hasil karya seni yang menjadi kebanggaan warga desa Kenongo,karena menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang merupakan warisan yang sangat berharga.Terangnya. (dy/khol)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT